



bpdh



kemitraan
partnership

Kabar

BBP GC+ REDD+ SULTENG OUTPUT2

Edisi Tujuh | April - Juni 2026

KPH Pulau Peling
Usulkan PS Seluas 1.144 Ha
di Banggai Laut.

Perkuat pengelolaan Sistem
Informasi Safeguard REDD+
(SIS REDD+), Pemprov Sulteng
lakukan kunjungan belajar
ke Kalimantan Timur

PETI di Kab Parigi Moutong
Berhasil Diamankan
Oleh KPH Dampelas Tinombo

Perkuat Pengelolaan Hutan Lestari,
KEMITRAAN bersama Dinas Kehutanan
Dampingi 58 kelompok Perhutanan Sosial (PS) di Sulawesi Tengah.

Perempuan Penjaga Hutan

untuk Kehidupan Semua Orang.



Tata Kelola sebagai Fondasi Aksi Iklim

Perubahan iklim sering dipandang sebagai persoalan lingkungan. Padahal, di balik setiap upaya menurunkan emisi dan menjaga kelestarian hutan, terdapat satu faktor yang menentukan keberhasilannya, yaitu tata kelola.

Tata kelola yang baik memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan tindakan nyata untuk menghadirkan ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan. Tata kelola juga memastikan bahwa setiap intervensi berjalan secara transparan, akuntabel, menghormati hak masyarakat, serta berkelanjutan.

Keyakinan inilah yang menjadi landasan KEMITRAAN dalam mendukung implementasi Program RBP GCF REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami percaya bahwa terjaganya hutan dan berkurangnya emisi merupakan hasil dari implementasi tata kelola, yang tercermin dari kuatnya institusi pengelola sumber daya alam, kapasitas masyarakat pengelola hutan secara lestari, serta tumbuhnya kepercayaan dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan.

Cerita dalam edisi ini memperlihatkan bagaimana prinsip tersebut diwujudkan di tingkat tapak. Percepatan Perhutanan Sosial memberikan kepastian akses sekaligus mendorong pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Pendampingan terhadap kelompok pemegang izin memperkuat kelembagaan dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Patroli perlindungan hutan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga integritas kawasan hutan.

Sementara itu, penguatan implementasi Sistem Informasi Safeguard REDD+ memastikan bahwa setiap proses pembangunan berlangsung secara inklusif, transparan, dan memenuhi prinsip-prinsip perlindungan sosial maupun lingkungan.

Kami melihat bahwa perubahan yang paling bermakna justru tumbuh dari masyarakat sendiri. Ketika pemerintah desa, kelompok Perhutanan Sosial, Polisi Kehutanan, perempuan, pemuda, dan masyarakat adat maupun lokal memiliki ruang untuk berpartisipasi, maka perlindungan hutan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban pemerintah semata. Ia menjadi komitmen bersama yang lahir dari kesadaran bahwa keberlanjutan hutan adalah fondasi bagi keberlanjutan kehidupan.

Sebagai organisasi yang mengemban mandat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, KEMITRAAN memandang bahwa investasi terbesar dalam aksi iklim bukan hanya pada pembangunan fisik atau teknologi, tetapi pada penguatan institusi, kemitraan, dan kapasitas para pelaku di tingkat tapak. Karena hanya melalui tata kelola yang kuat, berbagai investasi pembangunan akan menghasilkan dampak yang bertahan dalam jangka panjang.

Newsletter edisi Mei–Juni 2026 bukan sekadar kumpulan capaian program, melainkan rangkaian pembelajaran tentang bagaimana kolaborasi, akuntabilitas, dan partisipasi mampu menghadirkan perubahan nyata serta berkontribusi terhadap upaya Indonesia menghadapi perubahan iklim.

Selamat membaca.



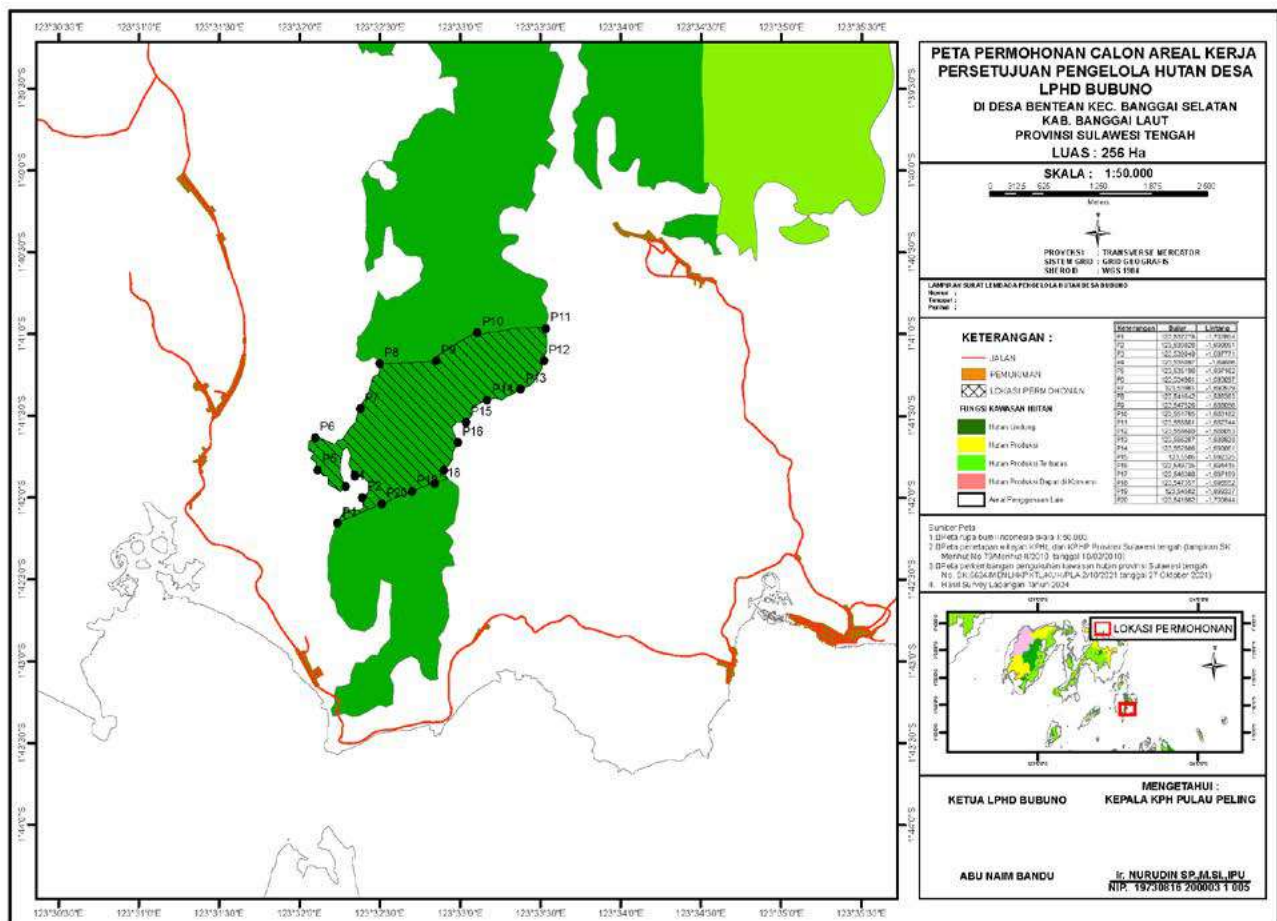
KPH Pulau Peling Usulkan Perhutanan Sosial Seluas 1.144 Ha di Banggai Laut.

Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kabupaten dengan luas daratan 726,67 km², terdiri dari 7 kecamatan, 3 kelurahan, dan 63 desa. Berdasarkan hasil analisis spasial, sebanyak ±55% pemukiman dan lahan kebun masyarakat Banggai Kepulauan berada di kawasan hutan seluas 18.526,9 Ha. Kondisi ini menyebabkan mereka rentan berhadapan dengan konflik agraria dan terjadinya praktik perusakan hutan.

Melihat kondisi tersebut, KPH Pulau Peling melalui dukungan program GCF REDD+ berinisiatif mengusulkan Perhutanan Sosial (PS) melalui skema Hutan Desa (HD) di tiga desa dampingan dengan total luas 1.144 Ha, yaitu Desa Bentean 592 Ha, Badumpayan 256 Ha, dan Malino 295 Ha.

Ir. Nurudin SP,MSi,IPU, Kepala UPT KPH Pulau Peling, menyampaikan proses pengusulan PS di Kab Banggai Laut dilakukan secara partisipatif, mulai dari kegiatan sosialisasi, pembentukan kelompok, pemetaan lokasi dan pembentukan Peraturan Desa (Perdes).

Nurudin juga menyebut lembaganya mendukung proses permohonan izin PS di ketiga desa tersebut, selain untuk memastikan hutan dapat dimanfaatkan secara legal oleh masyarakat, ia juga ingin mendukung upaya masyarakat pemohon izin PS yang ingin mengamankan sumber mata air di ketiga hutan tersebut.



“Selain kebun, keberadaan mata air di Kab Banggai Laut penting untuk dilindungi dengan tata kelola pemanfaatan hutan yang baik. Di daerah kepulauan jika sumber mata air hilang, maka akan menjadi bencana bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya mendukung kegiatan PS, proyek GCF REDD+ Sulawesi Tengah yang dijalankan oleh KEMITRAAN bersama Provinsi Sulawesi Tengah melalui dukungan BPDH juga mendukung perbaikan tata kelola hutan di kawasan hutan seluas ±135.173,6 Ha wilayah kerja KPH Pulau Peling yang ada di Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan.

Kiki Rizki Amalia, *Project Officer* PMU KEMITRAAN menjelaskan bahwa usulan perhutanan sosial di wilayah KPH Pulau Peling merupakan capaian penting dalam proyek GCF REDD+ Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kawasan hutan tetap terjaga dari ancaman kerusakan.

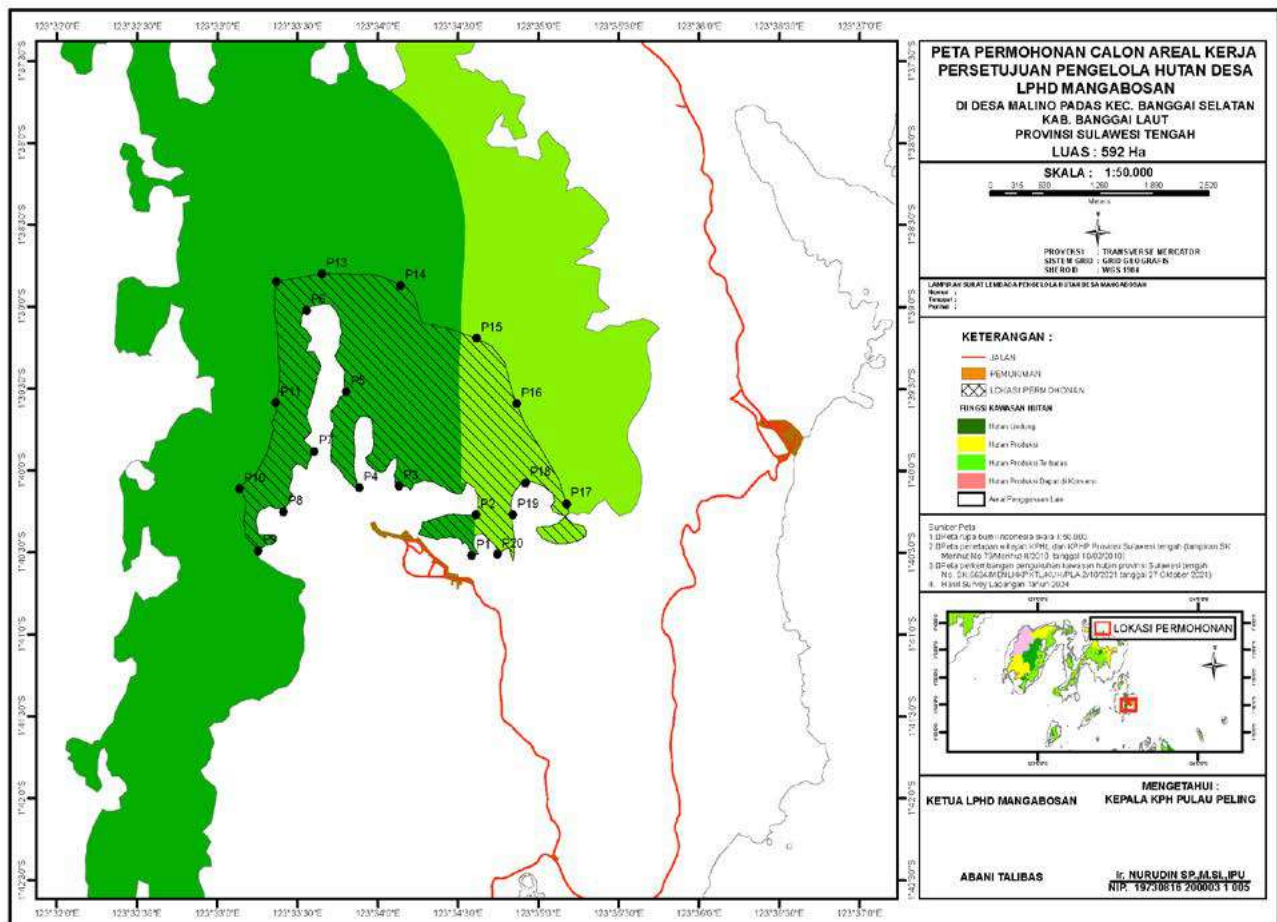
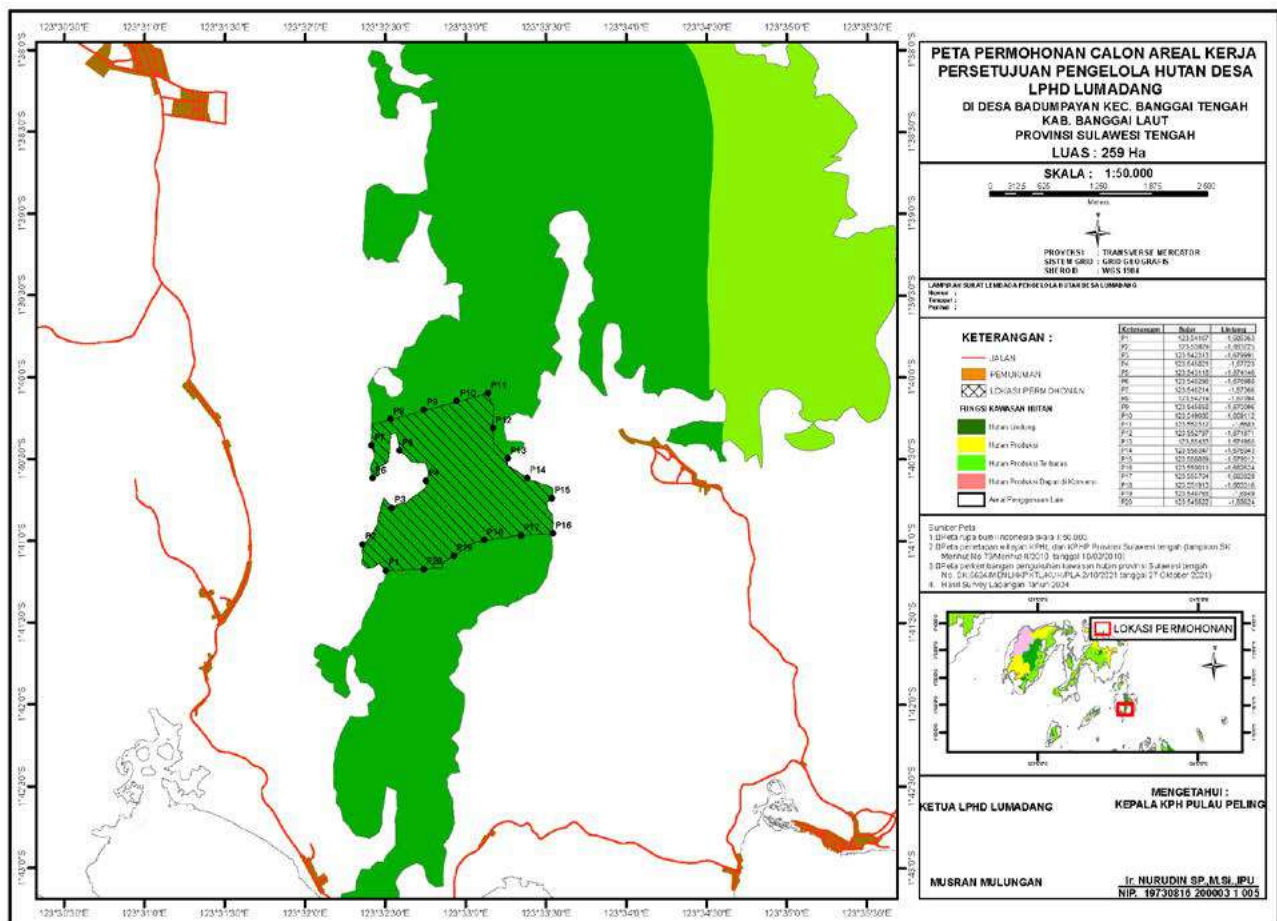
“Wilayah KPH Pulau Peling memiliki lansekap yang cukup unik, berada di gugusan pulau – pulau kecil dan pulau besar, yang di mana kawasan hutan tersebar di dalamnya. Kita ketahui bahwa wilayah

kepulauan, saat ini cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim, maka perhutanan sosial sebagai salah satu bagian utama dalam meminimalisir risiko tersebut,” ujarnya.

Proses usulan perhutanan sosial tersebut sudah disampaikan kepada BPSKL Seksi Wilayah II Sulawesi dan saat ini tinggal menunggu proses verifikasi teknis yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan.

“Sembari menunggu usulan perhutanan sosial disetujui, saat ini kegiatan yang dilakukan ialah menyusun dokumen RKPS (Rencana Kerja Perhutanan Sosial) dan pembentukan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) untuk memastikan pengelolaan perhutanan sosial terencana dengan baik,” ujar kiki menambahkan.

Pengusulan ketiga desa tersebut diharapkan segera disetujui oleh Kementerian Kehutanan untuk memberikan kepastian pengelolaan hutan di tiga desa, mengingat saat ini baru ada dua pemilik izin PS di Kabupaten Banggai Laut, yaitu Hutan Desa Asameo dan Hutan Desa Tolokibit dengan total luasan ±214 Ha.



Perkuat pengelolaan hutan lestari, KEMITRAAN bersama Dinas Kehutanan dampingi 58 kelompok Perhutanan Sosial (PS) di Sulawesi Tengah.

Pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) pasca izin di tingkat tapak menghadapi tantangan dalam mencapai tujuannya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi deforestasi. Salah satu penyebabnya terletak pada belum kuatnya tata kelola implementasi PS pasca kelompok mendapat izin.

Kondisi tersebut juga dialami oleh sebagian besar kelompok pemegang 165 SK izin PS dengan total luas 95.448,22 Ha yang tersebar di 13 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Melihat kondisi tersebut, Dinas Kehutanan melalui 13 Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) melakukan pendampingan kepada 58 kelompok PS. Dengan skema Program RBP GCF REDD+ Sulawesi Tengah, KPH dan KEMITRAAN memfasilitasi penguatan tata kelola pemanfaatan PS, mulai dari memfasilitasi tata batas, penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan kawasan hutan yang disusun oleh kelompok masyarakat pemegang izin/skim perhutanan sosial. Dokumen ini menjadi pedoman wajib selama 10 tahun yang berisi rencana kegiatan konservasi, pemanfaatan hasil hutan (kayu/bukan kayu), jasa lingkungan, dan pengembangan usaha.

Ambar Subekti Shut MP, dari KPH Sivia Patuju di Kabupaten Tojo Una-Una, menyebut fasilitasi kegiatan perhutanan sosial pada proyek ini sangat membantu

pihaknya untuk melakukan pendampingan kelompok yang telah menerima izin. Karena selama ini menurutnya, pendampingan minim dilakukan karena keterbatasan sumber daya.

“Penguatan PS meliputi tiga bentuk kegiatan yaitu tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha. Selain itu, PS juga memfasilitasi masyarakat mendapat akses terhadap kawasan hutan untuk mengurangi konflik tenurial,” ujarnya.

Peningkatan di tiga sektor utama tidak hanya dilakukan oleh KPH Sivia Patuju, melainkan juga KPH lain di Sulawesi Tengah. Sehingga diharapkan kelompok dampingan dapat secara optimal memanfaatkan izin yang telah diterimanya untuk meningkatkan kualitas ekonomi namun juga tetap menjaga kondisi hutan yang mereka kelola tetap lestari.

Edy Wicaksono, Program Manager PMU KEMITRAAN menyebut pemanfaatan PS untuk kesejahteraan dan kelestarian menjadi salah satu tujuan utama adanya program lembaganya di Sulawesi Tengah.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dapat “Melalui kegiatan ini, diharapkan jadi kontribusi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap target nasional dalam pembentukan kelompok usaha mandiri dan meningkatkan nilai transaksi ekonomi (NTE) perhutanan sosial,” ujarnya

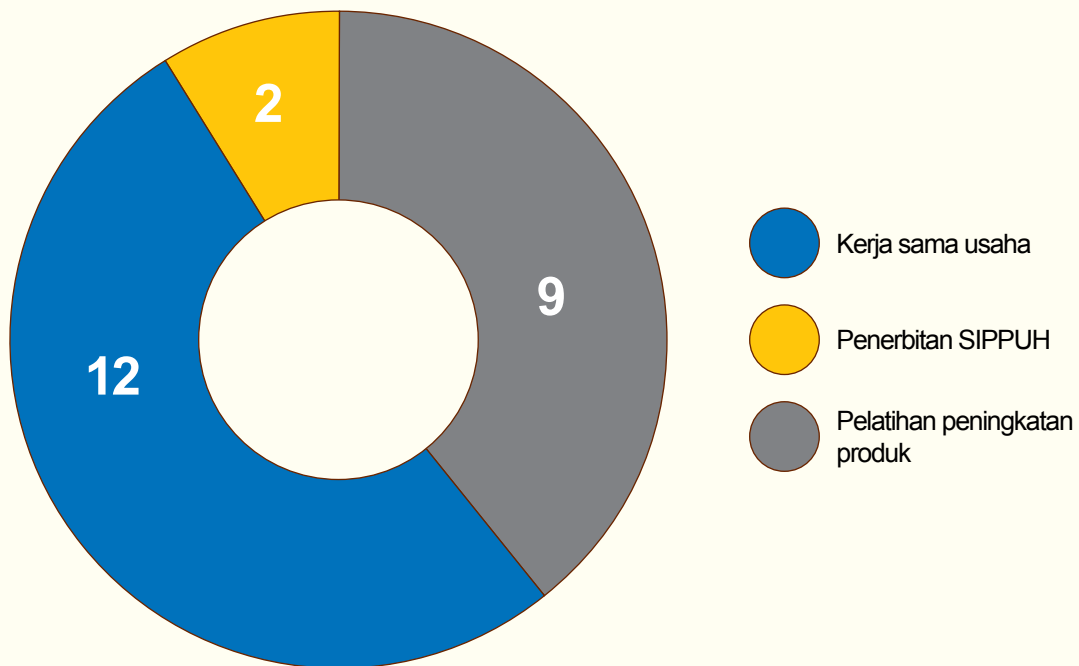
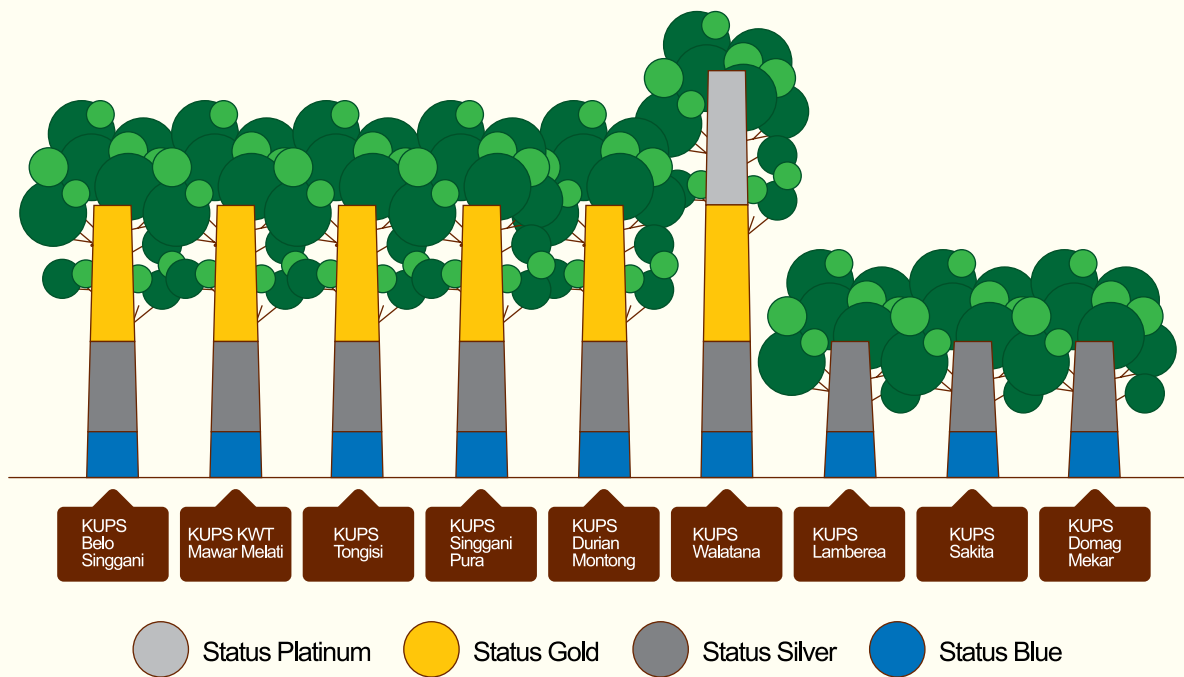
Di tingkat nasional, realisasi program PS sudah seluas 8,25 juta dari total target 12,7 juta ha. Dari sisi pembentukan kelompok, terdapat 15.925 kelompok usaha mandiri dari 25.000 target kelompok usaha dengan nilai transaksi mencapai Rp 4,5 Triliun.

Hingga kini, program yang dimulai tahun 2025 telah berhasil menjadikan 21 kelompok melakukan penataan kawasan melalui kegiatan penandaan pal batas dan inventarisasi potensi sosek. Sebanyak 20 kelompok memiliki dokumen RKPS, 6 kelompok berhasil membangun kerja sama

usaha dengan pihak ke tiga.

Sementara itu, 5 KUPS telah meningkatkan kelasnya, dari tipe silver ke gold, dan dari gold ke platinum, serta 6 kelompok telah meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pemanfaatan HHBK. Peningkatan tipe ini tidak hanya menunjukkan adanya tata kelola yang sudah mandiri, melainkan juga sudah terbukti mampu menghasilkan nilai transaksi ekonomi yang cukup memuaskan dan bermanfaat bagi kehidupan kelompoknya.







PETI di Kab Parigi Moutong Berhasil Diamankan Oleh KPH Dampelas Tinombo

Melalui dukungan program GCF REDD+ Sulawesi Tengah, KPH Dampelas Tinombo bersama Polisi Hutan (Polhut) di bawah Bidang Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan melakukan patroli pengamanan hutan di Kabupaten Parigi Moutong.

Ir. Godlief de Fretes, S.Hut., IPM dari KPH Dampelas Tinombo menyebut lembaganya rutin melakukan patroli sebagai bagian pengamanan hutan.

“Kegiatan patroli merupakan aktivitas pengawasan rutin, penegakan hukum, koordinasi antar instansi untuk mengantisipasi aktivitas ilegal yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu fungsi kawasan hutan” ujarnya.

Saat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan adanya paraktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di salah satu wilayah perbatasan antar desa, tim berhasil mengamankan dua unit excavator beserta dua orang pemilik modal yang sedang melakukan aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) perbatasan Desa Mbelang – Belang dan Desa Gio Barat seluas 4 Ha. Tim kemudian mendokumentasikan kerusakan yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan sebagai bukti untuk proses hukum.

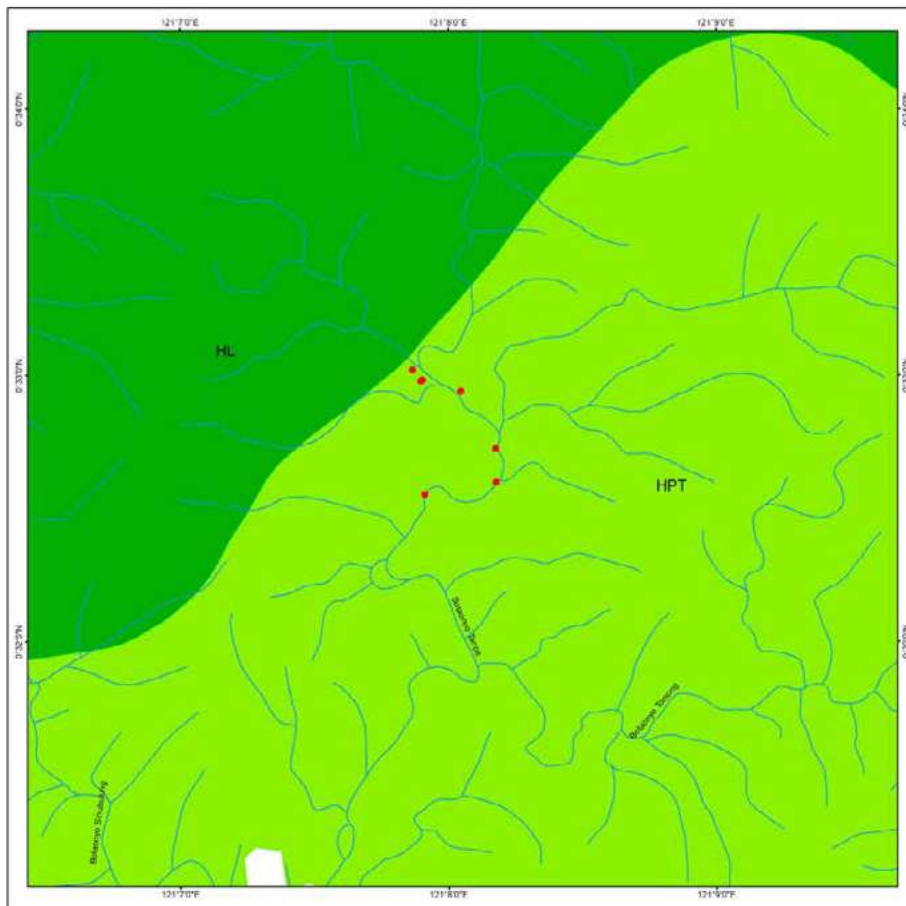
Pasca diamankan, dua unit excavator telah diserahkan kepada penitipan Rumah Barang Sitaan Negara (RBSN) Kejaksaan Tinggi untuk keperluan proses hukum. Sementara itu, pelaku

yang tertangkap tangan statusnya telah dinaikan menjadi tersangka berdasarkan hasil gelar perkara bersama Balai Gakkumhut Sulawesi, Seksi Wilayah II Palu.

Sementara area terdampak penambangan ilegal akan menjadi prioritas untuk program rehabilitasi hutan secara bertahap. Menurut Goldif, upaya ini dilakukan untuk memulihkan ekosistem yang rusak dan mengurangi risiko bencana lingkungan.

Pengelola program, Kiki Rizki Amelia *Project Officer* PMU KEMITRAAN menyebut lembaganya mendukung kegiatan patroli sebagai bagian dari komitmen untuk pengamanan dan mengurangi deforestasi hutan. Melalui program GCF REDD+, telah dilakukan patroli rutin sepanjang periode tahun 2025 – 2026 oleh 13 KPH dan Tahura di Provinsi Sulawesi Tengah.

“proyek ini sangat konsen pada perlindungan kawasan hutan yang berkontribusi pada pencapaian penyerapan emisi karbon, maka patroli salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan secara terus menerus,” ujarnya.



Perkuat pengelolaan Sistem Informasi Safeguard REDD+ (SIS REDD+), Pemprov Sulteng lakukan kunjungan belajar ke Kalimantan Timur



Pelaksanaan program RBP GCF REDD+ Sulawesi Tengah sangat konsen terhadap implementasi dan pelaporan safeguard dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sebagai penerima manfaat, melalui program RBP GCF REDD+ Pemprov Sulteng lewat Dinas Kehutanan bersama 13 KPH dan Tahura melakukan kunjungan belajar ke Provinsi Kalimantan Timur, untuk menambah pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan dan pelaporan SIS REDD+.

Aries Widjajanto, SH.,S.Hut Kepala KPH Toili Baturube menyampaikan safeguard merupakan salah satu bagian penting untuk dijalankan dalam setiap implementasi program di tingkat tapak, terutama pada KPH dan Tahura yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Pelibatan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat sangat penting pada program – kehutanan sebagai bentuk partisipatif untuk memastikan manfaat dapat dirasakan langsung dan benar – benar tepat sasaran”ujarnya

Tidak hanya implementasi, pelaksanaan *safeguard* sangat penting untuk dilaporkan dan didokumentasikan sehingga memudahkan proses *monitoring* dan evaluasi untuk mengetahui kendala serta hambatannya.

Kegiatan studi tiru dilaksanakan selama dua hari dengan metode diskusi *sharing session* pengalaman yang dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Timur dalam melaksanakan program Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF).



Penerapan SIS REDD+ di Kalimantan Timur menjadi perhatian utama dalam kunjungan studi tiru. Sistem ini, berperan memastikan aspek perlindungan sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan program penurunan emisi dapat terdokumentasi, terverifikasi dan berjalan sesuai standar internasional.

Iwan Darmawan Kepala Biro Perekonomian Sekda Kalimantan Timur menyampaikan “Kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kalimantan Timur berkomitmen penuh untuk membagikan rekam jejak, tantangan, serta keberhasilan implementasi program REDD+. Sinergi antar daerah seperti ini sangat krusial agar implementasi dan penguatan komitmen safeguards melalui SIS REDD+ dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia demi pencapaian target emisi nasional,”ujarnya

Setelah mendapat beragam materi dan pengalaman implementasi SIS REDD+, Pemprov Sulteng berkomitmen untuk melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan *safeguard* dalam implementasi program dan pembangunan daerah tambah Aries Widjanto.



Perempuan Penjaga Hutan

untuk Kehidupan Semua Orang.

Desa Mata merupakan satu – satunya desa yang berada tepat ditengah kawasan hutan di Kab Banggai Kepulauan. Mayoritas masyarakat bertani dan memanfaatkan hasil hutan seperti rotan, madu, dan pandan. Hutan serta mata air, merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat di desa ini.

Nur Ain Hi.H Diasomo adalah perempuan pertama yang menjadi Kepala Desa Mata periode 2025 – 2028, dalam kesehariannya Nur Ain selain mengurus rumah tangga Ia melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan desa.

Melaui program RBP GCF REDD+ KPH Pulau Peling melakukan patroli di Desa Mata untuk melakukan monitoring pencegahan terhadap kerusakan hutan. Selain melakukan patroli, polhut juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Intensitas patroli yang terus dilakukan di Desa Mata membuat Ibu Ain memahami pentingnya hutan harus di lindungi, selain menjaga fungsi ekologis juga untuk menjaga mata air. “Dulu saya menganggap status kawasan hutan hanya menghambat masyarakat untuk berkebun, ternyata dibalik itu ada manfaat besar untuk kehidupan dimasa yang akan datang, jika dirusak akan menjadi bencana” ujarnya

Sejak saat itu, Ibu Ain sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan hutan. Di Desa Mata, Ia juga membuat peraturan kepada masyarakat.





“

Jika ada yang menebang disekitar areal mata air dan DAS, satu pohon maka ia harus mengganti dengan 100 pohon baru yang ditanam sendiri.

”

Di setiap forum kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemkab Banggai Kepulauan dan KPH Pulau Peling, Ibu Ain aktif menyampaikan terkait perlindungan hutan terutama untuk kepentingan mata air dan pembangunan fasilitasnya serta pengusulan perhutanan sosial untuk mengatur tata kelola pemanfaatan hutan.

Selain itu, dalam kegiatan patroli Ia juga mengajak seluruh masyarakat terlibat bersama polhut dan melaporkan setiap aktivitas yang berpotensi merusak hutan.

Syarifuddin Moh Djafar resort II KPH Pulau Peling, kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sangat terbantu khususnya di Desa Mata karena pemerintah desa serta masyarakat sangat aktif membantu dan memiliki aturan.

“Selama aturan perlindungan dijalankan di Desa Mata sudah dua orang yang diberikan sanksi karena melakukan penebangan disekitar mata air dan masyarakat menjadi takut melakukan kegiatan ilegal didalam kawasan hutan” Ujarnya.

Pengusulan perhutanan sosial dengan skema hutan desa, di Desa Mata telah didampingi oleh KPH Pulau Peling untuk percepatan pengusulan. Mulai dari pembentukan kelompok, penyiapan perdes, dan pemetaan lokasi.



Kabar

RBP
SULAWESI
TENGAH

